

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Angkutan umum adalah salah satu media transportasi yang disediakan untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat dalam menunjang aktivitas sehari-hari dengan membayar tarif. Seiring pesatnya perkembangan, kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi yang efektif, efisien, dan nyaman juga semakin meningkat. Pelayanan angkutan umum merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi terutama untuk kota-kota besar dengan kepadatan dan mobilitas penduduk yang tinggi, termasuk pada wilayah studi Cibinong Raya.

Wilayah Cibinong Raya terletak pada Kabupaten Bogor yang merupakan salah kabupaten terbesar di Jawa Barat dengan jumlah penduduk 5,4 juta jiwa, memiliki pusat-pusat kegiatan yang sibuk dan terus berkembang sehingga mengakibatkan tingginya mobilitas masyarakat. Kondisi transportasi di Kabupaten Bogor didominasi oleh kendaraan pribadi yang mencapai jumlah 1,4 juta kepemilikan kendaraan pribadi, sedangkan untuk angkutan umum berjumlah 1867 berdasarkan data statistik Provinsi Jawa Barat. Pada Wilayah Studi Cibinong Raya, angkutan umum yang biasa digunakan masyarakat untuk berpergian banyak jenisnya mulai dari angdes (angkutan perdesaan), bis, ojek dan jasa angkutan online. Pada Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2018, terdapat 33 trayek angkutan perdesaan yang beroperasi di wilayah studi Cibinong Raya. Namun, berdasarkan hasil analisis tim PKL Kabupaten Bogor 2023 ditemukan trayek yang saat ini beroperasi semakin berkurang hingga hanya tercatat 21 trayek aktif yang beroperasi di lapangan, dengan 2 nomor trayek yang dibagi menjadi 2 segmen yaitu pada trayek 117 dan 12. Ditemukan juga pada semua trayek hanya bisa memenuhi beberapa indikator kinerja operasional yang ditetapkan standar Bank Dunia. Dari penilaian indikator kinerja operasional, trayek 34 dan trayek 35 memiliki kinerja terendah dibandingkan dengan trayek lainnya karena kedua trayek ini hanya memenuhi satu indikator yaitu

waktu perjalanan. Penggunaan kendaraan pribadi juga menyebabkan rendahnya minat masyarakat terhadap penggunaan moda angkutan umum. Hal ini dilihat dari rata-rata nilai faktor muat seluruh trayek yang hanya mencapai 35%, presentase tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan Bank Dunia yaitu 70%.

Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi kinerja operasional dan pelayanan angkutan umum, standar yang digunakan adalah berdasarkan SK Dirjen 687 Tahun 2002 dan standar pelayanan minimal PM 98 tahun 2013 dari persepsi penumpang trayek 34 dan trayek 35. Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan Kertas Kerja Wajib yang berjudul "**Evaluasi Kinerja Angkutan Perdesaan di Wilayah Cibinong Raya Kabupaten Bogor (studi kasus trayek 34 dan 35)**".

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, adapun identifikasi masalah yang terjadi pada wilayah studi terkait angkutan perdesaan antara lain:

1. Trayek 34 dan trayek 35 memiliki kinerja operasional paling rendah berdasarkan standar Bank Dunia.
2. Kedua trayek kajian hanya memenuhi satu dari enam indikator kinerja operasional angkutan umum yaitu waktu perjalanan.
3. Faktor muat yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan Bank Dunia 70% menandakan masyarakat belum sepenuhnya menggunakan angkutan umum.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dapat dirumuskan masalah angkutan perdesaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja angkutan perdesaan trayek 34 dan trayek 35 berdasarkan standar SK Dirjen 687 Tahun 2002?
2. Bagaimana pelayanan angkutan perdesaan trayek 34 dan trayek 35?
3. Bagaimana penilaian penumpang terhadap pelayanan angkutan perdesaan trayek 34 dan 35?

4. Bagaimana usulan untuk meningkatkan kinerja angkutan pedesaan trayek 34 dan 35?

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan dengan penjelasan rumusan masalah di atas, maka dapat dibuat tujuan yang akan dicapai dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini, antara lain sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja operasional angkutan pedesaan trayek 34 dan trayek 35.
2. Mengevaluasi pelayanan angkutan pedesaan trayek 34 dan trayek 35.
3. Menganalisis penilaian penumpang terhadap pelayanan angkutan pedesaan trayek 34 dan trayek 35.
4. Memberikan usulan untuk meningkatkan kinerja angkutan pedesaan trayek 34 dan 35.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini membahas mengenai Batasan masalah guna mempermudah dalam pengumpulan data dan pengolahan data lebih lanjut. Batasan masalah penulisan ini antara lain :

1. Evaluasi kinerja angkutan pedesaan hanya dilakukan pada trayek 34 dan trayek 35.
2. Evaluasi dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal angkutan umum yang kemudian diolah menggunakan metode *Importance Performance Analysis* dan *Customer Satisfaction Index* untuk menentukan prioritas penanganan.
3. Tidak memperhitungkan kinerja jaringan angkutan pedesaan.
4. Biaya operasional kendaraan tidak diperhitungkan.